

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diberi akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dan melangsungkan kehidupan Allah telah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia akan tetapi tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dapat melakukan pekerjaan di bidang usaha miliknya sendiri atau dapat melakukannya pada usaha milik orang lain dengan kesepakatan kerja sama.¹

Indonesia merupakan negara agraris, yang dimana kegiatan pertanian memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang hidup dan bekerja pada sektor perkebunan dan pertanian. Pertanian menjadi sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan manusia serta sebagai sumber penghasilan. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, terutama masyarakat pedesaan.²

Salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan yang merupakan

¹ Wardana Ramilan, *Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan*, Skripsi Universitas Islam Makasar (2019), 1

² Ana Liana Wahyuningrum Dan Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, *Tawazum: journal Of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 1. (2020)

kebutuhan terbesar bagi rakyat. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi hidup. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sebagian masyarakat menggunakan hidup mereka pada sektor pertanian. Untuk memenuhi sektor pertanian masyarakat menggunakan lahan tanah untuk media bertani, peran sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat terkhusus yang tinggal di pedesaan yang dapat memberikan kontribusi kesejahteraan masyarakat pedesaan guna meningkatkan kehidupannya.

Menurut BPS Tahun 2020, pekerja pada sektor pertanian memiliki presentase sebesar 29,76% atau sebanyak 38,23 juta jiwa dari jumlah penduduk bekerja 128,45 juta jiwa.³ Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian penduduk Indonesia. Bentuk dari usaha pertanian yaitu adanya sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah yang menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sawah dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dengan petani penggarap. Menurut Badan Pusat Statistik, untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan hidup digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.⁴

³ Badan Pusat Statistika, *Jumlah Pekerja Sektor Pertanian*, www.bps.go.id, diakses pada 13 Desember 2022

⁴ <https://pegunungan.bintangkab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.

Tabel 1.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Muara Enim

No	Nama Kecamatan
1	Semende Darat Laut
2	Semende Darat ulu
3	Semende Darat Tengah
4	Tanjung Agung
5	Rambang
6	Lubai
7	Lawang Kidul
8	Muara Enim
9	Ujan Mas
10	Gunung Megang
11	Benakat
12	Rambang Dangku
13	Gelumbang
14	Lembak
15	Sungai Rotan
16	Muara Belida
17	Kelekar
18	Belimbing
19	Lubai Ulu
20	Belida Barat

Dari tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Muara Enim memiliki 20 Kecamatan. Yang mana Topografi Kabupaten Muara Enim cukup beragam mulai dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Sebagian besar Kecamatan terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl) yang meliputi 20 kecamatan dengan cakupan mencapai 7.058,41 km² (77,22 %) dari luas

Kabupaten Muara Enim. Lima Kecamatan lainnya pada ketinggian lebih dari 10 meter di atas permukaan laut (mdp), yaitu Kecamatan Lawang Kidul (100-50 mdp), Kecamatan Tanjung Agung (500-800 mdp), Kecamatan Semende Darat Laut (500-1000 mdp), Kecamatan Semende Darat Tengah (100 mdp) dan Kecamatan Semende Darat Ulu (>100 mdp).⁵

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan masyarakat ini mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya keluarga tersebut mampu untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.⁶ Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera seseorang berbeda bagi satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar walaupun pendapatan yang didapatkan hanya sedikit. Dalam pengertian ekonomi, kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula.⁷

⁵ <https://www.muaraenimkab.go.id/web/kontent/12/geografis> diakses pada tanggal 2 Januari 2023 13.00 WIB

⁶ Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara" *Jurnal Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2017, h. 53.

⁷ Arifin Sitio, *Koperasi :TeoridanPraktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.19.

Masyarakat Di Desa Palak Tanah mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, tetapi banyak petani yang tidak memiliki lahan sawah sendiri untuk dioalah, mereka banyak yang mengerjakan sawah milik orang lain. Hal ini terjadi karena pemilik lahan tidak ada waktu serta tidak adanya kemampuan/keahlian dalam bercocok tanam. Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan pertanian, maka penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah petani dan mereka tidak memiliki lahan terdorong untuk melakukan kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka saling menguntungkan. Sebab Islam tidak menyukai tanah perkebunan yang tidak dimanfaatkan atau di kosongkan. Seperti yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dari Ibn Abbas yang menjelaskan bahwa :

“Sesungguhnya Rasulullah tidak mengharamkan bagi hasil dalam bertani, tapi Rasulullah memerintahkan supaya sesama manusia saling tolong menolong. Beliau bersabda barang siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia harus menanaminya atau ia berikan kepada saudaranya. Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya”.

Dari penjelasan tersebut mengajarkan untuk bekerja sama apabila pemilik lahan tidak mampu menggarap lahan miliknya, hendaklah ia memberikan lahannya kepada orang lain untuk dikelola dan membuat sebuah perjanjian agar tidak ada yang merasa dirugikan akan tetapi membagi keuntungan atas hasil panen yang dihasilkan setiap waktunya.

Berdasarkan kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, atau pemilik lahan tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain, lokasi tempat

tinggal pemilik lahan dan petani penggarap yang berjauhan menyebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kerap terjadi penjualan hasil panen secara tertutup oleh petani penggarap serta terjadinya pemutusan kerja sama oleh salah satu pihak.

Tabel 1.2
Kasus Penggarapan Sawah

No	Jenis Kasus	Penjelasan
1	Petani Penggarap melakukan penjualan panen secara tertutup	Penjualan hasil panen tertutup terjadi karena pemilik lahan yang selalu semena-mena dengan petani penggarap, pemilik lahan menginginkan hasil panen yang lebih banyak dari sebelumnya padahal kapasitas penghasilan lahan tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah bertambah.
2	Petani penggarap melakukan penjualan panen secara tertutup	Penjualan panen secara tertutup terjadi karena hasil panen yang telah disepakati di awal ternyata tidak memuaskan untuk petani penggarap, sehingga ketika waktu panen tiba sebagian dari hasilnya di jual terlebih dahulu dengan harapan keuntungan yang di dapat berlipat ganda. Hal ini jelas merugikan pemilik lahan.
3	Petani penggarap melakukan penjualan panen secara tertutup	Penjualan panen secara tertutup terjadi karena petani penggarap mengikuti arisan dengan sesama petani dengan sistem arisan beras tetapi ia menggunakan hasil panen untuk membayar arisan tersebut, kemudian petani penggarap mengaku dengan pemilik lahan bahwa hasil panen yang mereka

		dapatkan menurun sehingga kesepakatan di awal yang seharusnya pemilik lahan mendapatkan setengah dari hasil panen karena terjadi kecurangan ini maka pemilik lahan hanya mendapatkan sebagian dari hasil panen.
4	Pemilik lahan memutuskan kerjasama sepihak	Pemutusan kerjasama sepihak ini terjadi karena pemilik lahan ingin menggarap lahannya sendiri, padahal perjanjian di awal bahwa petani penggarap boleh menggarap sawahnya dengan jangka waktu 2 tahun tetapi sebelum jangka waktu 2 tahun hak milik sudah di ambil kembali, hal ini jelas merugikan petani penggarap dari waktu pengerjaan, tenaga yang telah ia lakukan selama penggarap sawah.

Dari tabel 1.2 disebutkan berbagai macam fenomena yang terjadi di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, walaupun mereka melakukan perjanjian atas dasar kekeluargaan namun ada kalanya sebagai manusia melakukan kesalahan atau kekhilafan. Maka dari itu peneliti melihat bahwa ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti tentang bagaimana prinsip pelaksanaan penggarapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palak Tanah. Dari Fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti mengangkat judul tentang ***“Analisis Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam***

***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Palak Tanah
Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim”.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim ?
2. Bagaimana Dampak Dari Bagi Hasil Penggarapan Sawah dengan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palak Tanah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Bagi Hasil Penggarapan Sawah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palak Tanah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermfaat dan berguna dalam menambah pengetahuan tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Manfaat praktis
 - a) Bagi petani

Petani diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem pertanian yang baik dan benar yang sesuai dengan konsep syariah, sehingga pertanian masyarakat dapat ditingkatkan lebih baik lagi.

b) Bagi masyarakat luas

Masyarakat diharapkan dapat mengetahui gambaran tentang bagi hasil dibidang pertanian dan kerja sama yang baik.

c) Bagi pembaca

Pembaca diharapkan dapat menambah informasi tentang pertanian khususnya dalam bagi hasil yang baik, sesuai dengan konsep syariah terutama di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penelitian ini dapat ditentukan dengan ulasan sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pelaksanaan penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang gambaran atau penjelasan tentang bagi hasil, kesejahteraan, ukuran kesejahteraan, penelitian terdahulu, dan Kerangka pemikiran.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, jenis data, sumber data , teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data penelitian.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penelitian dan pembahasannya tentang pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim mengenai analisis bagi hasil penggarapan sawah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

5. BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di berikan penulis baik pada masyarakat Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim berkenaan dengan pelaksanaan bagi hasil maupun saran bagi pembaca.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Bagi Hasil

Prinsip kerjasama (akad) dalam Ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang yang bergerak di sektor riil, juga adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Sehingga dengan adanya kerjasama bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian.⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama yang di dalamnya melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut di perjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Perjanjian bagi hasil suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas lahan pertanian dengan seorang penggarap yang ditentukan dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan.⁹

Menurut Antonio bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam ekonomi islam, yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Bagi hasil menurut undang-undang Republik Indonesia no 2 tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil adalah petani diberi wewenang oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan pertanian diatas pemiliknya, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

⁸ Miftahul Jannah “*pengaruh sistem bagi hasil [erkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat*” jurnal fakultas ekonomi dan bisnis universitas Mulawarman hal.4

⁹ Andre Rolef Bawohan, “Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara”, Vol.17 No.2, *Agri-Sosio Ekonomi*, Unsrat, 2021, 296

Dalam sistem bagi hasil menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan Camat, dan Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas). Batasan jangka waktu perjanjian bagi hasil untuk tanah sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan untuk tanah kering 5 tahun, pasal 4 undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pada saat perjanjian bagi hasil berakhir, namun tanaman belum di panen, maka perjanjian bagi hasil dapat terus berjalan sampai selesai panen dengan perpanjangan tidak boleh lebih dari satu tahun.¹⁰

Kerjasama bagi hasil ini didasarkan pada Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 29¹¹

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Dari ayat ini kita sebagai makhluk ciptaan-Nya dianjurkan untuk tidak memakan harta sesama karena hal ini sudah jauh dari ajaran Islam, dimana Islam mengajarkan untuk pembagian hasil yang tidak merugikan salah satu pihak akan tetapi diperbolehkan pembagian tidak sama asalkan satu sama lain

¹⁰ Chairuman Pasaribu, K.Lubis, dan Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal.12

¹¹ Terjemahan “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa” ayat 29)

saling suka dan ada persyaratan yang membuat perjanjian tersebut tidak menimbulkan pertentangan.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Sistem Pembagian Hasil Penggarapan Sawah

No	Persentase	Hasil Garapan	Bagian Penggarap	Bagian Pemilik
1	1/2 : 1/2	2 Ton padi	1 Ton padi	1 Ton padi
2	1/3 : 2/3	2 Ton padi	1,5 Ton padi	5 kuintal padi

Sistem pembagian hasil yang diterapkan di Desa Palak Tanah yakni 1/2 : 1/2 dan 1/3 : 2/3, untuk penentuan jumlah hasil garapannya disesuaikan dengan hasil panen di setiap lahan sawah, karena setiap lahan sawah berbeda-beda hasilnya sesuai dengan berapa hektar lahan yang dimiliki. Berikut penjelasan dari tabel 2.1 di atas tentang sistem pembagian hasil sawah di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

1. Pembagian hasil dengan perbandingan 1/2 : 1/2, maksudnya hasil yang diperoleh dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik memperoleh setengah dari hasil sawah dan petani penggarap memperoleh bagian setengahnya.
2. Pembagian hasil dengan perbandingan 1/3 : 2/3, maksudnya hasil yang diperoleh menjadi 3 bagian yaitu 2 bagian untuk petani penggarap dan 1

bagian untuk pemilik lahan atau 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk petani penggarap.

B. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Indikator kesejahteraan antara lain : (Badan Pusat Statistik).

1) Kependudukan

Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Badan Pusat Statistik indikator kependudukan kategori kepadatan penduduk terbagi menjadi tiga dan memiliki kriteria sebagai berikut:

Tingkat kesejahteraan kependudukan tinggi: >10.000 jiwa/km²

Tingkat kesejahteraan kependudukan sedang: 5-10ribu jiwa/km²

Tingkat kesejahteraan kependudukan rendah: <5.000 jiwa/km².

2) Kesehatan dan Gizi

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses

dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan angka harapan hidup. Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Badan Pusat Statistik indikator kesehatan kategori berobat jalan terbagi menjadi tiga dan memiliki kriteria sebagai berikut:

Tingkat kesejahteraan kesehatan tinggi: <5%

Tingkat kesejahteraan kesehatan sedang: 5-10%

Tingkat kesejahteraan kesehatan rendah: >10%

3) Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensipotensi pribadinya, yaitu rohani (pikir,karsa,rasa,cipta, dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat (Ihsan Fuad, 2005). Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Badan Pusat Statistik

indikator pendidikan terbagi menjadi tiga dan memiliki kriteria sebagai berikut:

Tingkat kesejahteraan pendidikan tinggi: Tamat Perguruan Tinggi

Tingkat kesejahteraan pendidikan sedang: Tamat SMA

Tingkat kesejahteraan pendidikan rendah: Tamat SD-SMP

4) Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Badan Pusat Statistik indikator ketenagakerjaan kategori angkatan kerja terbagi menjadi tiga dan memiliki kriteria sebagai berikut:

Tingkat kesejahteraan ketenagakerjaan tinggi: >50%

Tingkat kesejahteraan ketenagakerjaan sedang: 20-50%

Tingkat kesejahteraan ketenagakerjaan rendah: <20%

5) Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat di golongan kedalam dua kelompok

penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga atau keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Badan Pusat Statistik indikator ketenagakerjaan kategori angkatan kerja terbagi menjadi tiga dan memiliki kriteria sebagai berikut:

Tingkat kesejahteraan taraf dan pola konsumsi tinggi: <30%

Tingkat kesejahteraan taraf dan pola konsumsi sedang: 30-50%

Tingkat kesejahteraan taraf dan pola konsumsi rendah: >50%

6) Perumahan dan lingkungan

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Keadaan tempat tinggal merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dilihat dari apakah tempat tinggal tersebut telah layak huni atau masih bersifat non permanen. Artinya bahwa masyarakat yang sejahtera tentu saja akan memiliki tempat tinggal yang tergolong luas dan mewah, karena hal tersebut akan menjadi tolak ukur sampai sejauh mana masyarakat tersebut akan dipandang sejahtera oleh masyarakat lainnya. Dalam hal ini, keadaan tempat tinggal tersebut diukur. Adapun fasilitas yang dimaksudkan dinilai dari 11 item, yaitu penerangan, bahan bakar untuk memasak, pekarangan, pendingin,

kendaraan yang dimiliki, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas PDAM.

7) Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi minimal sebesar 2100 kilokalori perhari ditambah kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Patokan 2100 kilokalori ditentukan berdasar pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978 yang menyatakan seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilokalori perhari.

Kriteria kemiskinan yang termasuk salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan yaitu: Indeks kedalaman kemiskinan: merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan. Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Badan Pusat Statistik indikator kemiskinan terbagi menjadi tiga dan memiliki kriteria sebagai berikut:

Tingkat kesejahteraan kemiskinan tinggi: $<1 P1$

Tingkat kesejahteraan kemiskinan sedang: $5-1 P1$

Tingkat kesejahteraan kemiskinan rendah: >5 P1

Berdasarkan berbagai indikator yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan bukanlah suatu kondisi yang dapat tercapai dengan sendirinya. Diperlukan upaya-upaya tertentu guna mencapai kondisi kesejahteraan yang dalam hal ini dikenal sebagai upaya pembangunan kesejahteraan.

Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu kemiskinan haruslah dihapuskan karena kemiskinan merupakan suatu ketidaksejahteraan yang menggambarkan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹²

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai dan berkualitas atau setiap individunya mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹³

Dari pengertian-pengertian kesejahteraan tersebut, maka kesejahteraan ialah suatu keadaan manusia dalam kondisi yang aman, sentosa, dan tentram. Kondisi tersebut dapat terwujud ketika segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan

¹² Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). hlm.32

¹³ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

spiritual, mental, materi dan kebahagiaan melalui kemandirian manusia. Sedangkan kebutuhan fisik seperti kesehatan tubuh, kebutuhan materi seperti kualitas rumah, bahan pangan dan kebutuhan mental seperti pendidikan. Kemudian selanjutnya kebutuhan spiritual seperti moral dan etika manusia. Jika dikaitkan dengan kesejahteraan petani ini merupakan segala sesuatu yang dapat terpenuhi dalam hal sandang, papan, maupun pangan sehingga para petani dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan yang tinggi bisa diraih apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

2. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT. Jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.¹⁴

Konsep ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur islam adalah kepemilikan harta, meliputi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta.¹⁵

¹⁴ Darsyaf Ibnu Syamsuddien, Darussalam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), 66-68)

¹⁵ Muhammad Sholahuddin, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 2009), 220-221

Kesejahteraan manusia dapat diwujudkan dengan kebahagiaan hidup yang sedang dialami oleh manusia. Kesejahteraan dalam islam tentunya berbeda dengan kesejahteraan ekonomi Konvensional. Dimana Kesejahteraan Konvensioanl hanya menekankan pada kesejahteraan materi dengan mengabaikan spiritual dan moral. Sedangkan kesejahteraan dalam pandangan islam yaitu bertujuan mencapai kesejahteraan secara menyeluruh, baik material, dan spiritual.

Menurut Al-Syatibi menggunakan istilah masalah dalam penyebutan kesejahteraan. Kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maqhasid dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.

- 1) Kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan ini disebut dengan kebutuhan primer, menurut As-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu: memelihara agama (*hifzh ad-dien*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafsh*), memelihara an-nasab), memelihara harta (*hifzh al-maad*). untuk memelihara lima pokok inilah syariat islam diturunkan.
- 2) Kebutuhan *Hajjiyat*, jenis kebutuhan ini ialah kebutuhan sekunder
- 3) Kebutuhan *Tahsiniyat*, seperti yang dikemukakan Al-Syatibi tingkat kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan pelengkap.¹⁶

¹⁶ Abdul Muttalib “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur” Jurnal JIME. Vol.1 No. 2. 2015 hal 5

Dalam konsep maqasid al-syariah, manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah bertujuan memenuhi kebutuhan dalam spiritual dan materil. Al-Syatibi memposisikan agama sebagai dasar utama dalam elemen kebutuhan manusia, karena sejatinya agama merupakan fitrah manusia dalam mengarahkan kehidupannya. Sehingga sejahtera akan tercapai jika semua kebutuhan manusia yang dipenuhi itu berorientasi pada dunia akhirat.

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadanya. Allah swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk di dalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.¹⁷

(Q.S Al-A'Raf:10)¹⁸

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

Pada ayat ini, Allah swt mengingatkan kepada hambanya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Nikmat itu adalah sarana untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa bumi yang diciptakannya untuk tempat tinggal, tempat memenuhi segala hajat hidup, menguasai

¹⁷ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 595.

¹⁸ Terjemahan “Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit kau bersyukur”(Q.S Al-A'Raf:10)

tanah, hasil tanamannya, binatang-binatangnya, dan tambang-tambangannya.¹⁹

Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil'alamin* yang diajarkan dalam agama islam, namun kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya.²⁰

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tersebut kesejahteraan menurut Islam merupakan suatu keadaan dimana manusia memiliki perasaan bahagia baik lahir maupun batin. Kebahagiaan tersebut terwujud ketika manusia mampu memenuhi kebutuhannya seperti jasmani, rohani, dan kebutuhan sosial. Kebutuhan jasmani seperti kebutuhan makan, minum, sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan spiritual terpenuhi apabila manusia dapat kebebasan dalam melakukan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan kebutuhan spiritual juga dapat berwujud moral, etika atau perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Ukuran Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diukur melalui beberapa aspek kehidupan (Kolle,1974) yaitu :

¹⁹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid III* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 377

²⁰ Diaz Rizqi Wardani, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Tulungagung", *Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan*, Vol.6 No.7, 2019, hlm. 1452

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti kualitas rumah, bahan pangan
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti pendidikan
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral dan etika.

Konsep kesejahteraan dapat dilihat dari dua aspek :

- a. Dengan melihat tingkat perkembangan fisik, seperti nutrisi, kesehatan, dan harapan hidup.
- b. Dengan melihat tingkat mentalnya.²¹

Dari indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan. Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah. Dengan demikian kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang bergantung kepada sang khalik (bertaqwa

²¹ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Setara Press, 2016), hlm.7

kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah SWT maupun dalam hal ekonomi.

C. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis :

1. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Di Desa Tengin Kecamatan Sepatu Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Miftahul Jannah. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
 - a) Bagi hasil pemilik lahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - b) Bagi hasil penggarap/petani memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.²²
2. Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah* Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur oleh Abdul Muttalib. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
 - a) Pembagian hasil kerjasama usaha tani ialah 1/3

²² Miftahul Jannah “*pengaruh sistem bagi hasil [erkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat*” jurnal fakultas ekonomi dan bisnis universitas Mulawarman

b) Dalam tatanan kesejahteraan baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan dharuriyahnya saja yakni pada standar pemenuhan kebutuhan dasar, seperti konsumsi, dan ada sebagian yang fokus kepada pendidikan anak-anaknya. Tingkat pemenuhan pada standar penjagaan agama.²³

3. Pengaruh Pembiayaan Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia Dilihat Dari Pertumbuhan PDB oleh Atika.

Dalam penelitiannya sebagai berikut :

a) Variabel pembiayaan diperoleh $T_{hitung} -1,014$ sedangkan T_{tabel} dengan $\alpha 0,05$ sebesar 2,228 hal ini menunjukkan bahwa $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara pembiayaan terhadap PDV.

b) Variabel bagi hasil $T_{hitung} 2,467$ sedangkan $T_{tabel} 2,228$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat bagi hasil terhadap PDB (Kesejahteraan masyarakat).²⁴

4. Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Luqman Hakin dkk. Dalam penelitiannya sebagai berikut :

a) PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD lainnya yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

²³ Abdul Muttalib “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur” Jurnal JIME. Vol.1 No. 2. 2015

²⁴Atika “Pengaruh Pembiayaan Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia Dilihat Dari Pertumbuhan”2017

- b) Hasil pengujian diperoleh bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, DBH berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan PAD lainnya yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.²⁵
5. Implementasi Al-Masaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli oleh Emily Nur Saidy dan Ilman. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
- a) Ukuran yang digunakan untuk mengukur pembagian hasil panen cengkeh yaitu menggunakan timbangan
- b) Kerjasama antara pemilik kebun dan buruh petik cengkeh akan berdampak pada kesejahteraan baik pemilik kebun maupun buruh petik yang sesuai dengan kesejahteraan menurut imam syatibi yaitu terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁶
6. Pengaruh Nilai Bagi Hasil Pembangunan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tambang Emas Di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin Dalam Perspektif Ekonomi Islam oleh Trisna Levina dkk. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
- a) Rata-rata dari tingkat pendapatan sebelum bekerja tambang emas yaitu Rp 500.000-1.500.000 sedangkan rata-rata tingkat pendapatan setelah bekerja tambang emas yaitu Rp. 1.500.000-2.500.000

²⁵ Luqman Khakim dkk “Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat” Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12. No.2

²⁶ Emily Nur Saidy “Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kambo, Toli-Toli” Jurnal Fakultas dan Bisnis Islam. Vol 6, No 1

- b) Variabel nilai bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan pekerja tambang emas.²⁷
7. Eksternalitas Positif Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Muhammad Suciadi. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
- a) Dengan adanya perusahaan tambang batubara di kabupaten kutai kartanegara secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat. Seperti semakin meningkatnya jumlah penduduk di lingkungan pertambangan batubara yang menyebabkan semakin ramainya peluang usaha milik masyarakat (UMKM) sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ataupun daerah di sebabkan oleh sektor tambang.²⁸
8. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Dan *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus Di Desa Tadokkong Kec. Lembang Kab. Pinrang) oleh Indri anjar murni. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
- a) Variabel pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap variabel tingkat kesejahteraan petani penggarap
- b) Variabel *muzara'ah* berpengaruh terhadap variabel tingkat kesejahteraan petani penggarap.

²⁷ Trisna Levia “Pengaruh Nilai Bagi Hasil Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tabang Emas di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin dalam Perspektif Ekonomi Islam” Jurnal Najaha Iqtishod. Vol 3, No 2

²⁸ Muhammad Suciadi “Eksternalitas Positif Tambang BatuBara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. Vol 4, No 2

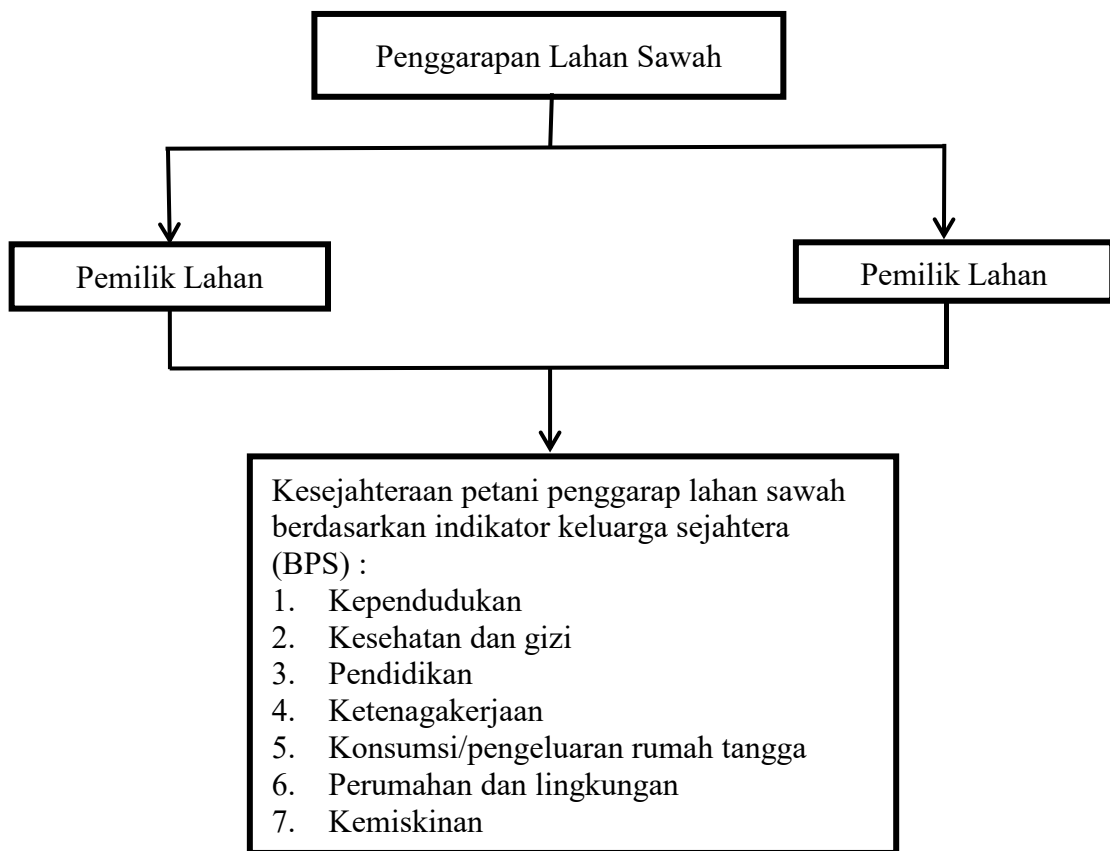
- c) Variabel pendapatan bagi hasil dan muzara'ah berpengaruh terhadap variabel tingkat kesejahteraan petani penggarap.²⁹
9. Analisis Sistem Bagi Hasil Produk *Mudharabah* Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah oleh Arni wulandari. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
- a) Besar pengaruh bagi hasil produk *mudharabah* terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi terlihat dari hasil analisis korelasi sederhana (r) adalah 0,734 dan berada di tingkat 0,60-0,799 menunjukkan arah hubungan (r) adalah positif hal ini terjadi hubungan yang kuat antara pengaruh sistem bagi hasil produk mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan anggota koperasi simpan pinjam syariah dan tingkat signifikan terlihat dari uji t hitung 7,078 dengan t tabel lebih besar dari t tabel 1,674, hipotesis yaitu H_a diterima yang berarti signifikan.³⁰
10. Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Oleh Aferiaman Telaumbauna. Dalam penelitiannya sebagai berikut :
- a) Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat berbagai indikator kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat desa Lasara Sowa mengalami peningkatan, walaupun tidak secara signifikan terutama

²⁹ Indri Anjar Murni “*Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus Di Desa Tadokkong Kec. Lembang Kab. Pinrang*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar

³⁰ Arni Wulandari “*Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

pada indikator pendidikan dan pendapatan masyarakat, hal itu terkendala di alokasi pendanaan yang di terima oleh pemerintah desa sehingga tidak dapat maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh.³¹

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran

³¹ Aferieman Telaumbauna “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi. Vol 1, No 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas keputusan yang diambil untuk mempelajari sebuah tema secara lebih mendalam, metode seperti apa yang diterapkan, tujuan dan manfaat apa saja yang diperoleh dari penelitian serta hasil dari penelitian tersebut. Karena penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan berangkat dari kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data-data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pemilik lahan dan petani penggarap sawah melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan, literatur ataupun artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang diambil yaitu di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

Pendekatan penelitian deskriptif adalah suatu metode di dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau tulisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, peneliti secara deskriptif menjelaskan tentang bagaimana Analisis

Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian yang berlangsung. Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat praktek-praktek kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Palak Tanah. Penelitian dan observasi ini dilakukan pada tanggal 18-27 Januari 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.³² Dalam hal ini sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian, yakni masyarakat Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim yang

³² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 402

melakukan penelitian dan memberikan secara langsung informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci.³³

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari informasi pihak lain maupun literatur-literatur kepustakaan yang relevan dari masalah yang diteliti.³⁴ Berdasarkan keterangan tersebut yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber kedua/sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku, artikel baik dari internet maupun media perantara lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Populasi dan Sampel³⁵

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan petani penggarap yang ada di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim yaitu berjumlah 150 populasi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Peneliti telah merencanakan informan yang akan menjadi

³³ Indriantoro Dan Supomo, 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, hal. 79

³⁴ Husein Umar, *Metodologi untuk penelitian skripsi dan testi bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 22

³⁵ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung:Alfabeta,2010), hal. 61

sumber informasi, bila data yang diperoleh dari wawancara tersebut belum mencukupi maka peneliti mengambil informan baru untuk wawancara. Pengambilan sampel akan berhenti ketika semua informasi yang ada sudah cukup, jenuh dan sudah memenuhi kebutuhan. Maka dari itu sampel dari penelitian ini berjumlah 15 informan yang ada di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.³⁶ Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan di kehidupan nyata. Objek penelitian ialah masyarakat Desa Palak Tanah.

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang akan dilakukan adalah observasi yang terstruktur yaitu melakukan pengumpulan data yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.³⁷ Dalam konteks penelitian kualitatif, observasi tidak untuk menguji kebenaran

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif R&D), (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 401

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 205

tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan aspek/kategori sebagai aspek studi yang dikembangkan peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi dengan tujuan untuk mengetahui secara faktual tentang bagaimana sesungguhnya analisis bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk mengetahui perilaku manusia, dan untuk evaluasi pengukuran terhadap aspek tertentu yang melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab atau komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi yang belum peneliti peroleh atau dapatkan.³⁸ Teknik wawancara ini ialah bentuk menerima informasi secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar yang diteliti oleh peneliti secara lisan dan direspon secara lisan pula. Maka dari hasil wawancara tersebut peneliti menggabungkan dari penemuan data lainnya dimana peneliti hanya memiliki perlengkapan perekam suara, buku catatan dan peralatan yang terkait dengan wawancara.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 413

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dengan cara mendapatkan suatu data yang telah ada dan biasanya berupa tulisan, catatan, gambar, atau benda lain serta karya-karya monumental dari seseorang. Teknik ini dipergunakan untuk mengumpulkan keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Teknik dokumentasi ini dilakukan peneliti untuk mengetahui aturan-aturan tinjauan ekonomi mengenai Analisis Bagi Hasil Penggarapan Sawah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dengan cara mempelajari dan menelusuri referensi yang menyangkut masalah di dalam penelitian tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu tahap pencarian dan penyusunan data yang telah didapatkan dari observasi, dan wawancara sehingga menjadi data yang sistematis agar mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sejelas mungkin permasalahan yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, factual dan akurat. Kemudian pembahasan ini di simpulkan secara *deduktif* yakni dengan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat

dipahami dengan mudah.³⁹ Hasil dari penelitian harus melalui proses analisis terlebih dahulu agar dapat di pertanggung jawabkan.

Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian kualitatif ketiga tahapan tersebut meliputi:

1. Reduksi data

Tahapan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mngumpulkan data selanjutnya. Reduksi data penelitian ini memfokuskan pada seberapa penting sistem bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan petani pada Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

2. Penyajian atau Pengumpulan Data

Tahapan penyajian data meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan sekumpulan data yang teorganisir dan terkategori berdasarkan indikator terkait sistem analisis bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian hasil dari penyampaian data ini mempermudah peneliti dalam upaya memaparkan kesimpulan.

³⁹ Miming Lestari, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Di Kota Makasar*” (Makasar:UIN Alauddin, 2015), hal. 40

3. Penarikan Simpulan

Penarikan simpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis pada sistem bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan petani, yaitu berupa temuan tentang analisis sistem bagi hasil penggarapan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan yang mempraktikkannya pada masyarakat Desa Palak Tanah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

Sejarah berdirinya Desa Palak Tanah yaitu pada tahun 1936, Data yang didapat berasal dari cerita masyarakat setempat yang disampaikan turun temurun dari mulut ke mulut sampai ke generasi sekarang.

Berdasarkan cerita masyarakat asal usul nama desa Palak Tanah diberikan karena desa Palak Tanah merupakan desa tertinggi di antara dua desa yaitu Desa Kota Agung dan Desa Muara Tenang, Palak Tanah (Tertinggi) yang mana Desa Palak Tanah merupakan pemekaran dari Desa Kota Agung pada tahun 1936 dan di kepalai oleh seorang Kerio/Kepala Desa pertama kali yaitu M.Noh Bin Kembaroen.⁴⁰

Desa Palak Tanah adalah nama dari suatu desa yang terletak diwilayah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, yang menurut beberapa tokoh masyarakat pada zaman penjajahan, nenek moyang berasal dari Muara Tenang ingin menjadi kerio namun selalu gagal. Dengan ketentuan waktu itu anak puyang tersebut harus dijadikan kepala (kerio) dan tidak boleh ditandingi, maka berdasarkan hibah tanah dan keinginan puyang tersebut untuk menjadikan anaknya kepala(kerio)

⁴⁰ Sehoupani, Masyarakat Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, *Wawancara*, 18 Januari 2023

maka penjajah mengabdikan keinginan puyang tersebut, maka dari situlah asal-muasal nama Desa Palak Tanah.

2. Letak Geografis dan Batasan Wilayah Desa Palak Tanah

Suatu wilayah dengan penghuninya terdiri dari beberapa keluarga dan memiliki struktur pemerintahan dengan dikepalai oleh seseorang yang disebut Desa. Selain itu desa juga disebut sebagai permukiman penduduk dengan tanah, iklim dan air yang menjadi persyaratan terpenting dalam mewujudkan kehidupan agraris penduduknya.⁴¹

Tabel 4.1

Wilayah Desa Palak Tanah berdasarkan Penggunaannya

No	Penggunaan	Luas Wilayah
1	Permukiman	2,5 Ha
2	Persawahan	40 Ha
3	Perkebunan	50 Ha
4	TPU	1 Ha
5	Perkantoran	40x50 m
6	Tanah Desa	1 Ha

Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

⁴¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 2005), hal.256

Tabel 4.2
Perbatasan Wilayah Desa Palak Tanah

Perbatasan	Nama Desa	Kecamatan
Sebelah Barat	Desa Ogan Ulu	Ogan Kemiring Ulu
Sebelah Timur	Desa Tanjung Raya	Semende Darat Tengah
Sebelah Utara	Desa Kota Agung	Semende Darat Tengah
Sebelah Selatan Selatan	Desa Tanjung Agung	Semende Darat tengah

Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

Tabel 4.3
Jarak Desa Palak Tanah Dengan Pusat Pemerintahan

Nama Desa	Pemerintahan	Jarak
Desa Palak Tanah	Ibu Kota Kecamatan	4 Km
Desa Palak Tanah	Ibu Kota Kabupaten	65 Km
Desa Palak Tanah	Ibu Kota Provinsi	150 Km

Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

3. Visi dan Misi Desa Palak Tanah

a) Visi

Terwujudnya Masyarakat TALAS

Transparan, Amanah, Loyal, Agamis, Sejahtera.

b) Misi

Misi Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah,

Kabupaten Muara Enim, adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan

- a. Mengaktifkan kerja perangkat desa sesuai dengan fungsinya guna menumbuhkan kepercayaan dalam melayani masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, adil, dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a. Peningkatan air bersih bagi masyarakat melalui program PAMSIMAS
- b. Pembangunan pemandian dan WC umum bersama masyarakat
- c. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- d. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM Masyarakat
- e. Mengelola limbah sampah agar dapat menjadi pendapatan desa.

3) Bidang Pertanian

- a. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- b. Mempermudah petani mendapatkan pupuk pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian.

4) Kesehatan dan Pendidikan

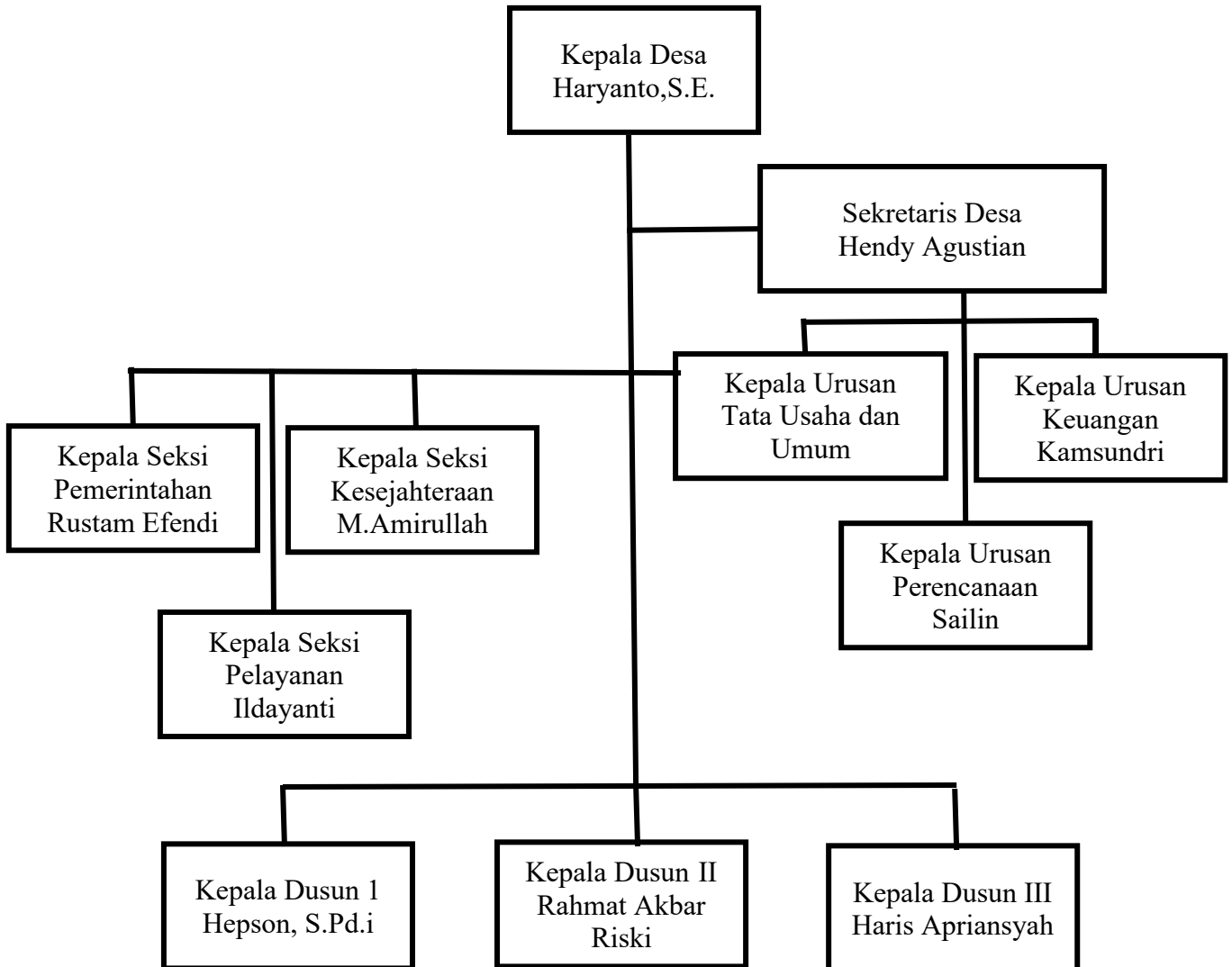
- a. Mengoptimalkan POSYANDU yang ada dengan bekerja sama Bidan Desa

- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Pembersihan lingkungan desa secara gotong royong bersama masyarakat dan berkelanjutan.
- 5) Bidang Karang Taruna
- a. Memberdayakan dan membina karang taruna sebagai tempat bujang gadis menyalurkan bakat dan kreativitas pemuda/I untuk menjadikan karang taruna yang mandiri dan maju.
- 6) Bidang Keagamaan
- a. Menjaga ketentraman masyarakat dalam menjalankan kegiatan beragama
 - b. Mendukung pembangunan fasilitas untuk menjalankan kegiatan beragama.

4. Struktur Pemerintahan Desa Palak Tanah

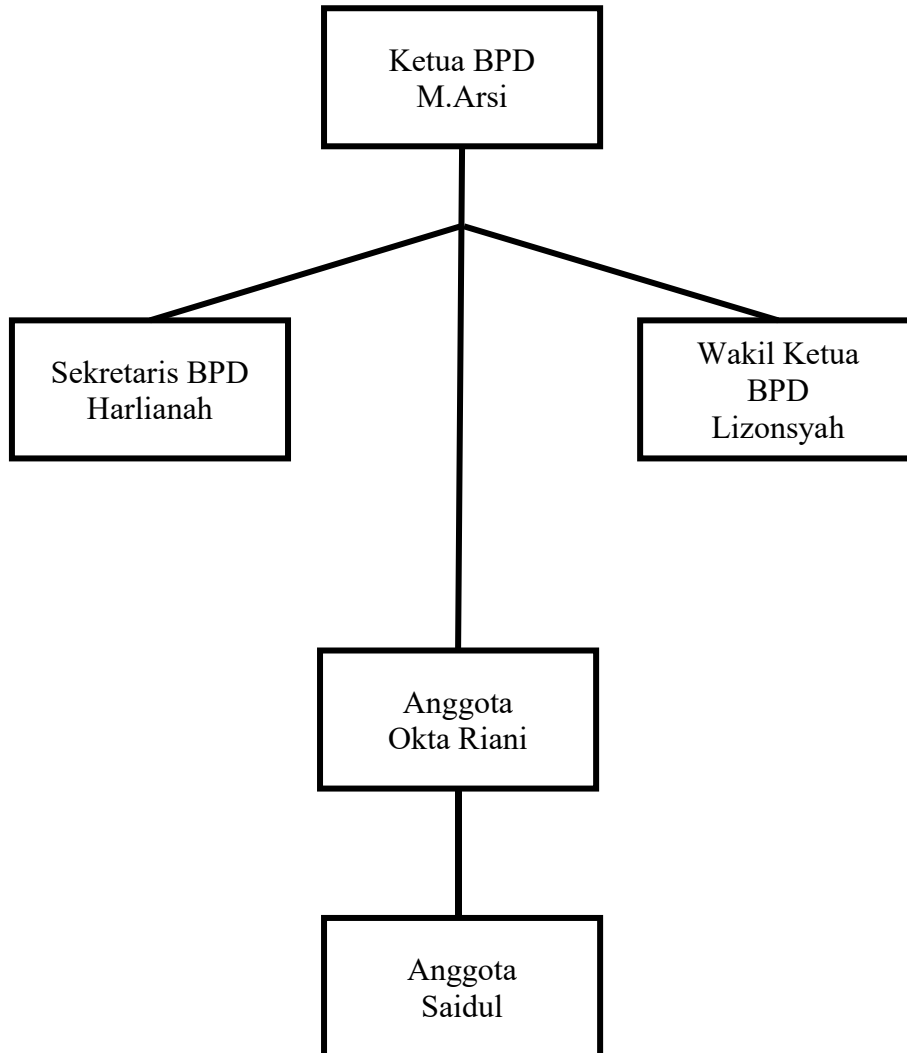
Dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat, Desa Palak Tanah dipimpin oleh seorang kepala desa, dalam hal ini kepala desa Palak Tanah dipimpin oleh Bapak Haryanto, S.E. Kepala Desa bertugas untuk menata kehidupan bermasyarakat serta menjalankan pemerintahan. Dan terdapat aparat yang membantu mewujudkannya. Adapun struktur pemerintahan desa Palak Tanah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Palak Tanah Tahun 2022



Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

Gambar 4.2
Struktur Badan Permusyawaratan Desa Palak Tanah Tahun 2022



Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

Dari struktur pemerintahan desa Palak Tanah yang telah diuraikan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan kerjasama yang kuat antara kepala desa dengan lembaga desa dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, dengan adanya lembaga pemerintahan desa maka akan membantu dalam menata kehidupan masyarakat dan memudahkan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan.

5. Kondisi Masyarakat

Desa Palak Tanah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, mayoritas penduduk merupakan keturunan asli semende. Dalam mengelola persawahan masyarakat menerapkan sikap saling tolong menolong misalnya ada dua orang petani yakni petani a dan petani b, kedua petani ini melakukan pembersihan rumput di sawah mereka (*ncalau*) maka petani a akan membantu petani b untuk *ncalau* sawah kemudian apabila petani b akan melakukan *ncalau* maka petani a akan membantu, kerjasama tersebut di Desa Palak Tanah disebut dengan *bayar hari*.⁴²

Jumlah penduduk Desa Palak Tanah pada tahun 2022 yakni berjumlah 1153 orang dengan penduduk laki-laki berjumlah 603 orang dan penduduk perempuan berjumlah 550 orang.

Tabel 4.4
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penduduk dan Keluarga	Jumlah
1	Penduduk Laki-laki	603 Jiwa
2	Penduduk Perempuan	550 Jiwa
3	Kepala Keluarga	1153 KK

Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

⁴² Sehadi, Masyarakat Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, wawancara, 18 Januari 2023

6. Pendidikan, Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta dalam meningkatkan perekonomian pada khususnya. Pendidikan dapat mendongkrak tingkat kecakapan seseorang sehingga mampu mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan akhirnya dapat mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Pendidikan akan dapat mempertajam istematika pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Adapun fasilitas pendidikan yang berada di Desa Palak tanah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Fasilitas Pendidikan Desa Palak Tanah Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah Sekolah	
		Negeri	Swasta
1	Gedung PAUD/TK	-	1
2	Gedung SD/MI	2	1
3	Gedung SMP	1	-
Jumlah		5 unit	

Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan di Desa Palak Tanah sudah ada namun masih terbilang belum lengkap karena hanya tersedia pendidikan PAUD, SD, dan SMP. Untuk pendidikan menengah atas masyarakat harus ke desa

tetangga yang jaraknya terbilang jauh dari desa Palak Tanah dan untruk ke perguruan tinggi masyarakat harus ke luar desa. Dalam melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi masyarakat Desa Palak Tanah biasanya menyekolahkan anak-anaknya di kota atau kabupaten yang berjarak 68 Km dari desa, perguruan tinggi yang dapat ditemui dengan jarak terdekat yaitu, STITH. STEBIS, AKBID dan Tarbiya Muara Enim.

Apabila masyarakat desa Palak Tanah ingin menempuh pendidikan lebih luas dan dengan jurusan terlengkap maka masyarakat harus menempuh dunia pendidikan di kota provinsi yang berjarak 150 Km dari Desa Palak Tanah.

b. Ekonomi

Pertumbuhan penduduk yang besar biasanya menjadi modal dasar pembangunan, maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Pertumbuhan sumber penghasilan Ekonomi masyarakat desa Palak Tanah secara umum juga mengalai peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Palak Tanah masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan

perkebunan, hal ini dapat diindikasikan bahwa masyarakat Desa Palak Tanah terbebannya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan perkebunan karet dan kelapa sawit oleh karena tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini, bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan.

Lahan persawahan di Desa Palak Tanah masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan persawahan, sehingga sebagian besar petani yang tidak mempunyai lahan sendiri bekerja sebagai buruh tani, Masyarakat desa Palak Tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ada yang memiliki lahan persawahan namun tidak bisa mengelolah dan menjalankannya menjadi sebuah usaha yang produktif, ada juga yang memiliki kukurangan lahan persawahan namun memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengelola dan merawat lahan sawah secara produktif, dibutuhkan sikap saling tolong menolong supaya menguntungkan keduanya sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Palak Tanah.

c. Keagamaan

Penduduk Desa Palak Tanah 99,5 % memeluk agama islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat islam seperti, dalam memperingati hari besar islam, perkawinan, khitanan, musibah kematian dan lainnya.

Tabel 4.6
Fasilitas Keagamaan Desa Palak Tanah Tahun 2022

No	Nama	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	1
3	TPA/Langgar	2
Jumlah		4

Sumber: Dokumentasi Desa Palak Tanah Tahun 2022

Selain dilihat dari peran aktif masyarakat dalam kegiatan harian, desa Palak Tanah juga termasuk desa agamis dilihat dari banyaknya remaja lulusan pesantren, pengajian-pengajian dari berbagai umur.

B. Hasil Penelitian Observasi

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

Masyarakat desa Palak Tanah mayoritas pekerjaannya ialah petani, baik merawat lahan mereka sendiri maupun mengelola lahan milik orang lain. Dalam mengelola dan merawat lahan sawah ada yang memilih menggarap sekaligus merawat lahan sawah sendiri, dan ada juga yang memilih untuk dikelola oleh orang lain dikarenakan beberapa hal berikut: *pertama*, adanya rasa saling tolong menolong terhadap sesama untuk membantu perekonomiannya, *kedua*, pemilik lahan sawah tidak sanggup

untuk mengelola lahan sawahnya disebabkan karena luasnya lahan persawahan, *ketiga*, memiliki pekerjaan lain di luar seperti menjadi guru sehingga tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan sawahnya. *Keempat*, letak lahan sawah yang jauh dari rumah pemilik, *kelima*, kurangnya kemampuan dalam penggarapan sawah yang dimiliki oleh pemilik lahan sehingga menyerahkan lahan miliknya kepada petani penggarap yang mempunyai kemampuan baik dalam menggarap agar memberikan hasil yang maksimal.

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Palak Tanah menggunakan bagi hasil yang sudah biasa dilakukan masyarakat, dimana sistem pelaksanaannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Sistem Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Minsur sebagai petani penggarap sawah, dia menyatakan bahwa kerjasama yang diterapkan dalam perjanjian bagi hasil ini adalah menggunakan akad lisan.

“Kerjasama bagi hasil yang ada di Desa Palak Tanah dari dulu hanya menggunakan akad lisan tanpa adanya hitam diatas putih, hal tersebut dilakukan karena adanya sikap saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. Hal itu juga yang saya lakukan sebagai petani penggarap yang melakukan kerjasama dengan lisan, namun hal-hal yang menyangkut batas lahan sudah dijelaskan oleh pemilik lahan.”⁴³

Perjanjian yang dilakukan di Desa Palak Tanah sebagian besar hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis

⁴³ Wawancara dengan Bapak Minsur selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari 2023

sebagai dasar penguat hukumnya. Dari perjanjian tersebut pemilik lahan menyerahkan lahan sawah untuk dikelola dengan baik kepada petani penggarap, hal tersebut dilakukan dengan mengucapkan langsung secara lisan. Namun mengenai kewajiban penggarap dan hasil yang didapat serta pembagian hasilnya sudah dijelaskan oleh pemilik lahan, kemudian apabila petani penggarap bersedia mengelola lahan sawah tersebut maka disanalah terjadi kerjasama. Hal ini sama dengan hasil wawancara dengan bapak Udirman sebagai pemilik lahan sawah.

*“Dari awal saya melakukan kerjasama lahan sawah ini hanya menggunakan kesepakatan secara lisan, dari saya pemilik lahan yang sudah memberikan kepercayaan kepada petani penggarap untuk mengelola lahan sawah saya dengan baik. Alasan saya menyerahkan lahan sawah saya untuk digarap ialah untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan saya juga tidak mempunyai waktu untuk mengelola sendiri lahan sawah tersebut”.*⁴⁴

Perjanjian bagi hasil ini hanya menggunakan akad lisan karena pemilik lahan menaruh kepercayaan penuh kepada petani penggarap dan juga terkadang petani penggarap ialah masih bagian dari keluarga pemilik lahan sehingga merasa tidak perlu menggunakan akad secara tertulis sehingga pemilik menempatkan kepercayaan untuk mengelola lahan sawah tersebut sekaligus membantu ekonomi keluarga penggarap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Udirman selaku pemilik lahan, pada tanggal 18 Januari 2023

2) Sistem Bagi Hasil

Untuk pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap sawah di Desa Palak Tanah, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Junadar selaku petani penggarap sawah, yaitu :

“Sitem bagi hasil yang kami terapkan ialah sistem paroan yang mana hasilnya dibagi dua antara saya penggarap dengan pemilik lahan, misalnya hasil panen mencapai 2 ton kemudian hasil tersebut dibagai dua yakni 1 ton untuk pemilik lahan dan 1 ton untuk penggarap.”⁴⁵

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Sehadhi selaku pemilik lahan sawah dengan hasilnya:

“Sistem bagi hasil yang kami terapkan yaitu dibagi 2 atau 1/2:1/2 misalnya hasil panen mencapai 1 ton maka akan dibagi dua yaitu masing-masing mendapat 50 kuintal. Namun di Desa Palak Tanah sendiri memiliki 2 sistem bagi hasil yaitu sistem paro dan sistem sasih yang mana sistem sasih ini ialah pembagian 1/3:2/3 sesuai dengan kesepakatan mereka dan biasanya hasil untuk petani penggarap lebih besar dari pemilik lahan.”⁴⁶

Masyarakat Desa Palak Tanah dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah menerapkan sistem sasih dan sistem paro, artinya ada dua sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap. Sistem sasih ialah 1/3:2/3, artinya hasil yang didapat oleh penggarap lebih besar daripada pemilik lahan karena semua biaya pengerjaan lahan sawah ditanggung oleh penggarap dan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Dan untuk sistem paro

2023 ⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Junadar selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Sehadhi selaku pemilik lahan, pada tanggal 18 Januari 2023

ialah pembagian hasilnya dibagi 2 antara penggarap dengan pemilik lahan, hal ini dilakukan karena biaya pengerjaan sawah dianggung bersama. Hal tersebut juga sama dengan hasil wawancara kepada informan yaitu bapak Gunawan selaku penggarap sawah, yaitu :

“Pembagian hasil yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan diawal yang mana pembagian hasilnya yang kami terapkan ialah sistem sasih atau 1/2:2/3. Untuk hasilnya ialah berupa beras dan pembagian dilakukan setelah panen dilakukan.”⁴⁷

Kemudian peneliti juga mewawancarai petani penggarap bapak Mamat sebagai berikut:

“Untuk bagi hasilnya yang biasa diterapkan ialah sistem sasih hal ini merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dengan saya yang kemudian hasilnya dibagi lebih besar untuk saya dan sisahnya untuk pemilik lahan.”⁴⁸

Dalam penerapan sistem bagi hasil, masyarakat Desa Palak Tanah terdapat 2 pembagian hasil yaitu sistem sasih dan sistem paro. Namun pembagian hasil tersebut biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan diawal, jika pemilik lahan juga membantu biaya penggarapan sawah maka sistem yang dilakukan ialah sistem paro namun jika pemilik lahan hanya menyediakan lahan dan biaya ditanggung oleh penggarap maka sistem yang diterapkan ialah sistem sasih dan hasilnya juga penggarap lebih besar daripada

2023 ⁴⁷ Wawancara dengan bapak Gunawan selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

2023 ⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Mamat selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

pemilik lahan. Dan untuk pembagian hasil tersebut dilakukan setelah seluruh hasil panen telah selesai.

3) Hak Dan Kewajiban Kedua Pihak

Pemilik dan petani penggarap sawah yang bertindak sebagai subjek akad tentu memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Dimana hak merupakan sesuatu yang didapatkan dari kerjasama pengelolaan lahan sawah ini dan kewajiban merupakan hal yang wajib antara masing-masing pihak penuhi selama kerjasama berlangsung. Menurut hasil wawancara dengan salah satu penggarap yaitu Bapak Gunawan hak dan kewajiban penggarap sawah yaitu sebagai berikut:

“Hak kami selaku penggarap lahan sawah adalah mendapatkan hasil panen yang telah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal kerjasama. Dan kewajiban kami selaku petani penggarap ialah memelihara dan merawat lahan sawah yang telah diserahkan kepada kami dengan baik sehingga hasil yang didapatkan memuaskan, seperti menanam padi, pembersihan hama, pembersihan rumput liar, penyemprotan, pemupukan dan melakukan panen.”⁴⁹

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pemilik lahan sawah, yaitu sebagai berikut:

“Hak kami selaku pemilik lahan selain mendapatkan hasil dari sistem bagi hasil ini kami juga berhak atas kebersihan lahan sawah, dan kewajiban kami sebagai pemilik lahan sawah ialah menyerahkan lahan sawah kami untuk dikelola dan dipelihara kepada penggarap dalam keadaan bersih dan menjelaskan hal-hal terkait kerjasama, misalnya batas lahan, hasil yang biasa didapatkan.”⁵⁰

2023 ⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

⁵⁰ Wawancara dengan Ib Eli selaku pemilik lahan, pada tanggal 19 Januari 2023

Kewajiban pemilik lahan sawah dalam kerjasama bagi hasil di Desa Palak Tanah adalah menyerahkan lahan sawah untuk digarap kepada petani penggarap dalam keadaan bersih dan menjelaskan hal-hal terkait kerjasama. Adapun hak pemilik lahan sawah adalah hasil yang diterima setiap panen dari penggarap merupakan hasil yang sesuai dengan kesepakatan diawal.

Kewajiban penggarap ialah mengerjakan semua bentuk penggarapan mulai dari menanam sampai masa panen. Dan untuk hak penggarap adalah menerima hasil dari penggarapan sawah yang ia kerjakan.

4) Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil di Desa Palak Tanah merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yang di dalamnya terdapat kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama. Kerjasama di Desa Palak Tanah seringkali terjadi kesalahan baik dari sisi pemilik lahan maupun dari penggarap. Kesalahan terjadi diantaranya pemutusan kerjasama yang mengakibatkan berakhirnya kerjasama perjanjian bagi hasil.

Peneliti melakukan wawancara dengan penggarap. Sebagai berikut:

“Selama saya menggarap sawah, kesepakatan berakhir apabila pemilik mengambil kembali lahannya karena kontrak atau batas saya menggarap sawah telah habis, perjanjian di awal

*hanya 1 tahun saya menggarap, jika sudah waktunya maka lahan kembali kepada pemilik”.*⁵¹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Mulyadi selaku penggarap. Sebagai berikut:

*“Kerjasama bagi hasil di Desa Palak Tanah berakhir apabila pemilik lahan mengambil lahannya dan penggarap berhenti dengan alasan tertentu. Saya menggarap sawah ini dengan perjanjian 2 tahun dan setelah 2 tahun maka lahan sawah akan kembali kepada pemilik atau pemilik lahan mempercayakan lagi kepada saya untuk menggarap lahannya untuk tahun berikutnya.”*⁵²

Berakhirnya kerjasama dalam praktik kerjasama bagi hasil di Desa Palak Tanah terjadi apabila kontrak telah selesai dan pemilik mengambil lahannya secara tiba-tiba. Dan salah satu pemilik lahan mengatakan berakhirnya kerjasama ketika penggarap tidak mampu lagi bekerja dan waktu kesepakatan telah jatuh tempo.

2. Dampak Dari Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Palak Tanah

Dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini petani mendapat bagian dari hasil panen. Untuk besaran bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sehadhi selaku pemilik lahan yaitu:

“Kerjasama bagi hasil ini justru sangat membantu perekonomian keluarga saya, karena hasil dari panen bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kerjasama ini saya merasa bersyukur karena lahan sawah saya dikelola dengan baik oleh petani penggarap karena dirawat

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Hermia selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari 2023

⁵² Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

dengan baik oleh penggarap sehingga hasil panen yang didapatkan melimpah.”⁵³

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Rasmudin selaku petani penggarap sawah :

“Dengan adanya kerjasama ini saya bisa meningkatkan kesejahteraan, karena kerjasama ini dapat saling tolong menolong, contohnya saya bisa menolong pemilik lahan untuk merawat dan mengelolah lahan sawahnya karena beliau tidak dapat mengelolah lahannya sendiri. Begitu juga sebaliknya pemilik lahan juga menolong saya yang tidak punya sawah untuk menggarap sawahnya sehingga dengan sistem bagi hasil muzara’ah ini saya mempunyai penghasilan.”⁵⁴

Kerjasama penggarapan sawah yang dipraktikan di Desa Palak Tanah ini sangat berpengaruh dalam mengangkat perekonomian kedua belah pihak. Akan tetapi kedua belah pihak juga harus memiliki penghasilan tambahan guna menambah pendapatannya. Sehingga apabila ada kebutuhan yang mendesak dapat terpenuhi dengan penghasilan tambahan tersebut. Penghasilan tambahan dari petani bisa dari membuka warung, menjadi buruh tani, buruh bangunan dan berkebun kopi/sayur-sayuran.

Untuk kebutuhan primer dari hasil panen meliputi sandang, pangan, papan sudah cukup terpenuhi hal itu diungkapkan oleh Ibu Eli selaku pemilik lahan:

“Untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makan dan sandang itu cukup, karena untuk kebutuhan makan saya ada beras dari hasil panen lahan yang digarap oleh petani penggarap dan sisahnya saya jual untuk memenuhi kebutuhan lainnya.”⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Bapak Sehadhi selaku pemilik lahan, pada tanggal 18 Januari 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Rasmudin selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Eli selaku pemilik lahan, pada tanggal 19 Januari 2023

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Santi selaku petani penggarap, ia mengatakan:

“Dengan saya menggarap lahan sawah milik orang lain ini kebutuhan primer seperti sandang, papan sudah tercukupi, untuk kebutuhan papan seperti merenovasi rumah saya, akan tetapi untuk membangun/membuat rumah saya rasa tidak cukup, karena membutuhkan uang yang tidak sedikit.”⁵⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Mamat selaku petani penggarap:

“Kerjasama bagi hasil ini bisa mencukupi kebutuhan antara pemilik lahan dan penggarap, akan tetapi untuk menambah penghasilan agar lebih banyak maka petani harus mempunyai usaha sampingan.”⁵⁷

Kerjasama penggarapan sawah memang dapat memenuhi kebutuhan primer, hal itu dapat ditandai dengan petani mendapat beras dari hasil lahan yang ditanaminya. Tetapi untuk kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap juga memiliki pendapatan tambahan selain dari kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian tersebut.

Adapun untuk memenuhi kebutuhan lain seperti berobat saat sakit, membeli sayuran dan lauk yang bergizi ada yang mengatakan cukup. Sebagaimana yang di jelaskan oleh penggarap.

“Untuk menunjang kebutuhan saat sakit atau membeli lauk yang bergizi dari hasil panen cukup, tetapi harus ada penunjang/penghasilan lain, seperti saya menjadi buruh bangunan dan ada sedikit kebun kopi untuk memenuhi kebutuhan tambahan.”⁵⁸

Hal ini juga dijelaskan oleh ibu Santi

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Santi selaku petani penggarap pada tanggal 18 Januari 2023

2023 ⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Mamat selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

2023 ⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

“Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dengan kerjasama bagi hasil ini saya rasa cukup, karena hasil yang saya dapatkan lumayan banyak, dan untuk memenuhi kebutuhan lauk yang bergizi juga cukup buktinya saya mampu membeli lauk-pauk, sayur-sayuran dan daging ayam. Tetapi harus ada pendapatan lain untuk keperluan mendesak.”⁵⁹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh penggarap:

“Pemenuhan kebutuhan kesehatan dan membeli sayuran serta lauk yang bergizi itu cukup, karena selama saya melakukan kerjasama ini saya bisa membeli lauk yang bergizi seperti daging ayam, ikan. Dan untuk keperluan kesehatan saya bisa berobat ke Puskesmas dengan membawa kartu keluarga saja maka saya akan mendapatkan pengobatan gratis”.⁶⁰

Pemenuhan kebutuhan fisik dilihat pemenuhan kebutuhan fisik yang sudah merasa cukup, dan ada yang merasa kurang cukup. Ini dilihat dari pemilik tanah yang luas jadi hasil panen yang melimpah bila digarap dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang banyak, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dan ada yang merasa tidak cukup karena lahan yang digarap sedikit. Dari penghasilan yang cukup dan tidak cukup, antara kedua belah pihak sepakat harus adanya penghasilan tambahan untuk menunjang hal tersebut.

Adapun untuk kebutuhan mental seperti pendidikan, petani yang melaksanakan kerjasama bagi hasil ini merasa tercukupi.

Seperti yang di jelaskan oleh penggarap sebagai berikut:

“Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan saya rasa cukup dengan menggunakan sistem kerjasama ini, ini dibuktikan dengan anak saya yang masih duduk di kelas 1 SD, 1 SMP dan 3 SMP, tapi perlu juga penghasilan tambahan”.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Santi selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Mamat selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Santi selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari 2023

Ungkapan tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari bapak

Gunawan:

*“Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dari SD sampai SMA, cukup hanya saja untuk ke jenjang kuliah saya rasa tidak cukup, karena memerlukan biaya yang cukup banyak. Tetapi dengan mempunyai pendapatan lain saya rasa cukup untuk sekolah ke jenjang perkuliahan”.*⁶²

Ungkapan serupa juga di jelaskan oleh bapak sehadri selaku pemilik lahan.

*“Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 12 tahun belajar, saya rasa cukup. karena sekarang biaya pendidikan gratis. Dan untuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah saya rasa tidak cukup perlu tambahan pendapatan. Kerjasama ini bukan penghasilan utama saya karena penghasilan utama saya ialah ada di bengkel. Dengan itu saya dapat menyekolahkan anak saya ke jenjang yang lebih tinggi lagi.”*⁶³

Dari pemaparan diatas semua narasumber sepakat untuk kebutuhan pendidikan 12 tahun mereka merasa cukup. Tapi mereka masih perlu penghasilan tambahan untuk membiayai pendidikan sampai ke perkuliahan.

Adapun untuk kebutuhan spiritual dapat dilihat dari moral dan etika dari para petani dan pemilik lahan yang melakukan kerjasama tergolong baik. Seperti yang di ungkapkan dengan bapak Sehoulpani sebagai berikut:

*“Beliau mengungkapkan bahwa para petani dan pemilik lahan kerap mengikuti kegiatan keagamaan seperti yasinan mingguan, acara hajatan, dan merayakan hari besar islam seperti sholat di hari raya idul fitri, sholat idul adha, tahun baru islam, maulid nabi”.*⁶⁴

⁶² Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku petani penggarap, pada tanggal 18 Januari 2023

⁶³ Wawancara dengan Bapak Sehadri selaku pemilik lahan, pada tanggal 18 Januari 2023

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sehoulpani selaku masyarakat desa Palak Tanah, pada tanggal 18 Januari 2023

Berdasarkan observasi dan wawancara moral serta etika petani yang menggunakan kerjasama tergolong baik, ini dibuktikan baik dari pemilik lahan dan petani penggarap memiliki moral dan etika yang baik.

Mengukur tingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Pusat Statistik berdasarkan 7 indikator:

1. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu negara. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah penduduk desa palak tanah pada tahun terakhir 2022 yakni berjumlah 1153 orang dengan penduduk laki-laki berjumlah 603 orang dan penduduk perempuan berjumlah 550 sehingga kepadatan penduduk mencapai 1153 jiwa/km². Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Badan Pusat Statistik indikator kependudukan kategori kepadatan penduduk di Desa Palak Tanah termasuk ke dalam tingkatan kesejahteraan penduduk rendah yaitu Tingkat kesejahteraan kependudukan rendah: <5.000 jiwa per km².

2. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang. Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa kesehatan di desa Palak Tanah tergolong

baik dengan kategori tingkat kesejahteraan kesehatan sedang yaitu 5-10% ini dilihat dari jumlah penduduk yang hanya 1153 jiwa.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan indikator yang mutlak diperlukan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang baik sangat diperlukan sebagai suatu modal yang penting dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mempunyai program wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa untuk pendidikan terakhir mereka mengatakan hanya tamat SMA, SMP, dan ada yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Namun untuk kategori kesejahteraan pendidikan berdasarkan Badan Pusat Statistik maka termasuk ke dalam tingkat kesejahteraan pendidikan sedang yakni Tamat SMA.

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang optimal karena mempunyai masalah yang beragam, diantaranya tingkat pengangguran tinggi, jumlah angkatan kerja tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata.

Berdasarkan jumlah penduduk desa Palak Tanah mencapai 1153 jiwa, yang mayoritas bekerja sebagai petani maka kategori kesejahteraan berdasarkan Badan Pusat Statistik termasuk ke dalam tingkat kesejahteraan sedang yaitu 20-50%.

5. Konsumsi/Pengeluaran Rumah Tangga

Konsumsi merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.

Hasil observasi menunjukkan bahwa taraf dan pola konsumsi digambarkan dengan pengeluaran perkapita, yakni mencapai kurang lebih Rp. 1.000.000 ini termasuk ke pengeluaran untuk makan dan bukan untuk makan. Sehingga termasuk ke dalam kategori menurut Badan Pusat Statistik Tingkat kesejahteraan taraf dan pola konsumsi rendah: >50%.

6. Perumahan dan Lingkungan

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa analisis tingkat kesejahteraan masyarakat desa Palak Tanah pada indikator perumahan dan lingkungan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang, dimana penduduk desa Palak Tanah rata-rata sudah memenuhi kriteria kepemilikan rumah, keadaan rumah, dan fasilitas rumah.

7. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi minimal sebesar 2100 kilokalori perhari ditambah kebutuhan dasar. bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Berdasarkan hasilobservasi peneliti bahwa tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Palak Tanah pada indikator kemiskinan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang, dimana penduduk desa Palak Tanah tingkat kemiskinannya setiap tahunnya mengalami penurunan.

Untuk bagi hasil yang diperoleh dari pemilik lahan dan petani penggarap dapat di jelaskan sebagai berikut:

Setelah peneliti melakukan kembali wawancara mengenai pendapatan dari pemilik lahan dan petani penggarap yang sebelumnya bahwa sistem pembagian hasil yang dilakukan di Desa Palak Tanah terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pendapatan untuk sistem Paroan

Sistem paroan adalah pembagian hasilnya dibagi 1/2:1/2 antara penggarap dengan pemilik lahan, hal ini dilakukan karena biaya pengerjaan sawah diatanggung bersama, dari hasil wawancara bahwa rata-rata penghasilan sawah mencapai 3 ton pada saat panen tetapi pembagian

hasil setelah dikurangi dengan biaya-biaya dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Biaya Traktor = Perhektar 2,5 kuintal = 250 kg

$$250 \text{ kg} \times \text{Rp. } 12.000 = 3.000.000$$

2) Biaya Garap = Rp 1.000.000

3) Biaya Pupuk = 50 kg = Rp 150.000

4) Biaya panen = Rp 1.200.000

Jadi untuk hasil sawah yang mencapai 3 ton = Rp 36.000.000 setelah dikurangi biaya-biaya maka hasilnya Rp. 30.650.000 dibagi 2 = Rp 15.325.000 dengan jangka panen 8 bulan.

2. Pendapatan untuk sistem sasih

Sistem sasih ialah 1/3:2/3, artinya hasil yang didapat oleh penggarap lebih besar daripada pemilik lahan karena semua biaya pengerjaan lahan sawah ditanggung oleh penggarap dan pemilik hanya menyediakan lahan saja. Sistem sasih untuk pembagian hasil yang didapat oleh pemilik lahan sudah ditentukan pada awal kerjasama, dari hasil wawancara bahwa hasil untuk pemilik lahan sawah adalah 6 kuintal = Rp.

7. 200.000. untuk perhitungannya sebagai berikut :

1) Biaya traktor = perhektar 2,5 kuintal = 250 kg

$$250 \text{ kg} \times \text{RP } 12.000 = 3.000.000$$

2) Biaya garap = Rp 1.000.000

3) Biaya panen = Rp 1.200.000

Jadi untuk hasil sawah yang mencapai 3 ton = Rp 36.000.000 setelah dikurangi biaya-biaya maka hasilnya Rp. 30.650.000 dibagi 3, yaitu 1 bagian untuk pemilik lahan = Rp 7.200.000 dan untuk petani penggarap = Rp 23.450.000 dengan jangka panen 8 bulan.

Dari pendapatan yang diperoleh oleh pemilik lahan dan petani penggarap ini mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena menurut hasil wawancara dengan informan kebutuhan mereka setiap 1 bulan sekali tidaklah besar mereka mengatakan bahwa untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan hanya kurang lebih Rp 1.000.000.

Maka dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil penggarapan sawah ini mampu mensejahterakan masyarakat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan baik itu kebutuhan primer, materi, fisik, mental dan kebutuhan spiritual. Selain itu juga para informan mengatakan bahwa mereka memiliki penghasilan tambahan dari selain menggarap sawah tersebut.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan bagian yang mendeskripsikan dari bab 1 yaitu pada bagian rumusan masalah. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

a. Sistem Perjanjian

Kerjasama penggarapan lahan sawah di desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah adalah dilakukan secara lisan tidak ada perjanjian secara tertulis, pemilik lahan meminta tolong kepada penggarap untuk menggarap lahan sawahnya. Setelah kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) menyetujui kerjasama maka mereka menjelaskan pembagian hasilnya, waktu untuk menggarap.

Kerjasama penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh petani Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sudah sesuai dengan teori yang sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan BPS dan menurut teori Al-Syatibi.

b. Sistem Bagi Hasil

Untuk sistem bagi hasilnya antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah dibicarakan di awal perjanjian. Terdapat dua pembagian hasil yang dilakukan di Desa Palak Tanah yaitu sistem sasih dan sistem paro/paroan. Sistem sasih ini ialah seluruh biaya tenaga dan pengerjaan lahan sawah dilakukan oleh petani penggarap dan untuk hasilnya yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, artinya hasil yang didapatkan oleh petani penggarap lebih besar daripada pemilik lahan, sedangkan sistem paroan yaitu dibagi rata antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu $1:2/1:2$ hal

demikian karena pembiayaan dan pengerjaan dilakukan berdua maka dari itu hasilnya dibagi rata. Dan untuk hasil yang didapat yaitu berupa padi dan beras, jika mereka menggunakan sistem sasih makan pemilik lahan mendapatkan beras dan jika mereka menggunakan sistem paroan pemilik lahan mendapatkan padi.

c. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak

Hak pemilik lahan ialah mendapatkan hasil panen dan berhak atas kebersihan lahan sawahnya, kewajiban pemilik lahan yaitu menyerahkan lahan sawah untuk dikelola. Dan hak petani penggarap ialah mendapatkan hasil dari kerja keras selama menggarap lahan sawah, untuk kewajiban petani ialah memelihara dan merawat lahan sawah yang telah diserahkan kepada petani penggarap.

d. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Kerjasama penggarapan lahan sawah di Desa Palak tanah berakhir jika pemilik lahan menarik lahannya kembali, apabila kontrak telah selesai dan pemilik mengambil lahannya secara tiba-tiba. Dan salah satu pemilik lahan mengatakan berakhirnya kerjasama ketika penggarap tidak mampu lagi bekerja dan waktu kesepakatan telah jatuh tempo.

2. Dampak Dari Bagi Hasil Penggarapan Sawah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Palak Tanah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Palak Tanah Kecamatan

Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ternyata kerjasama yang dipraktikan di Desa Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dapat meningkatkan kesejahteraan. Namun masyarakat sepatutnya harus ada penghasilan tambahan untuk menunjang biaya kehidupan lainnya.

a. Keadaan Perekonomian Setelah Melaksanakan Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah Dan Pemenuhan Kebutuhan Materi, Fisik, Mental Dan Spiritual

1) Keadaan Perekonomian Petani

Kerjasama penggarapan lahan sawah dapat meningkatkan perekonomian atau kesejahteraan dari pelaku kerja sama, atau paling tidak sudah menutup kebutuhan primer. Hal ini karena kerja sama menguntungkan bagi semua pihak, baik pihak pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian. Keuntungan dari melakukan akad kerjasama ini bagi pemilik lahan adalah pemilik lahan bisa memaksimalkan hasil dari lahan mereka, pemilik lahan dapat memperoleh penghasilan dari lahan mereka, tanpa harus bekerja atau mengelola. Bagi petani penggarap mendapatkan hasil tanah yang digarap tanpa harus membeli lahan sendiri yang sekarang cukup mahal.

2) Kebutuhan Materi

Dari hasil observasi dan wawancara pemenuhan kebutuhan materi bisa dilihat dari pemenuhan kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan. Pemilik lahan dan petani penggarap yang melaksanakan kerjasama penggarapan lahan sawah, kebutuhan pangannya terpenuhi dari hasil panen padi. Untuk kebutuhan sandang dan papan dapat terpenuhi dari hasil panen selain padi. Untuk kebutuhan papan sendiri ini bisa dilihat dari rumah yang sudah sangat layak, sedangkan untuk sandang sendiri sudah terpenuhi seiring dengan kebutuhan papan sudah terpenuhi.

Ini sebagaimana yang disebutkan oleh teori Al-Syatibi, dan menurut BPS tentang kesejahteraan bahwa ukuran kesejahteraan dapat dilihat dari kualitas hidup, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah dan bahan pangan. Dalam teori tersebut juga bisa diartikan bahwa kualitas papan meliputi rumah layak huni serta penyediaan sarana prasarana dirumah seperti halnya tersedianya pakaian bersih dan layak pakai, penyediaan kamar mandi, serta air bersih, serta kualitas pangan yang bergizi juga menjadi tolak ukur kesejahteraan.

3) Kebutuhan Fisik

Terpenuhinya kebutuhan fisik dilihat dari terpenuhinya kesehatan, responden telah menjawab bahwa kebutuhan kesehatannya telah terpenuhi, hal itu dilihat dari para petani yang

bisa berobat ketika sakit serta dapat memenuhi kebutuhan makan yang bergizi untuk kesehatan yang lebih baik.

Ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Syatibi dan Kolle sebagaimana yang dinyatakan bahwa ukuran kesejahteraan dilihat dari kualitas hidupnya, yaitu dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik. Kualitas hidup dari segi fisik dapat dilihat dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan.

4) Kebutuhan Mental

Terpenuhinya kebutuhan mental dilihat dari pemenuhan terhadap pendidikan. Para petani mengatakan untuk pendidikan 12 tahun sudah merasa cukup dengan melakukan kerjasama penggarapan lahan sawah untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Namun untuk pendidikan kuliah mereka harus memiliki penghasilan tambahan untuk menunjang pendidikan sapa ke jenjang S-1.

5) Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual biasa dilihat dari kualitas moral dan etika yang baik, hal ini dilakukan dengan praktik kerjasama penggarapan lahan sawah di desa Palak Tanah yang aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlilan dan merayakan hari-hari besar islam. Dan tidak adanya laporan hukum mengenai pelanggaran kerjasama. Sehingga secara moral dan etika dapat

tergolong baik. Dengan hal tersebut maka kesejahteraan dari segi spiritual dapat terpenuhi.

b. Tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa Palak Tanah berdasarkan Badan Pusat Statistik.

- 1) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator Kependudukan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan rendah, kepadatan penduduk desa Palak Tanah berjumlah 1153 jiwa/km² dimana tingkat kesejahteraan kepadudukan srendah: <5ribu jiwa/km².
- 2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator kesehatan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang sedang yaitu 5-10% ini dilihat dari jumlah penduduk yang hanya 1153 jiwa.
- 3) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator pendidikan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang, dimana penduduk Desa Palak Tanah persentase tertinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk ada pada jenjang SMA/ sederajat sudah memenuhi kriteria minimal 12 tahun program wajib belajar.
- 4) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa palak tanah mencapai 1153 jiwa, serta mayoritas bekerja sebagai petani maka kategori kesejahteraan berdasarkan Badan Pusat Statistik termasuk ke dalam tingkat kesejahteraan sedang yaitu 20-50%.

- 5) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah dengan taraf dan pola konsumsi digambarkan dengan pengeluaran perkapita, yakni mencapai kurang lebih Rp. 1.000.000. termasuk ke dalam kategori menurut Badan Pusat Statistik Tingkat kesejahteraan taraf dan pola konsumsi rendah: >50%
- 6) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator perumahan dan lingkungan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang, dimana penduduk desa Palak Tanah rata-rata sudah memenuhi kriteria kepemilikan rumah, keadaan rumah, dan fasilitas rumah.
- 7) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator kemiskinan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan, setelah melakukan penelitian dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Kerjasama dalam bagi hasil penggarapan sawah di Desa Palak Tanah hanya dilakukan secara lisan saja, hal ini disebabkan karena adanya rasa kepercayaan antara pemilik lahan kepada petani penggarap, sehingga merasa tidak perlu adanya akad secara tertulis untuk penguat hukum. Dalam pembagian hasil dari garapan sawah, masyarakat desa Palak Tanah menerapkan 2 sistem yaitu sistem sasih dan sistem paroan. Dan pembagian hasil tersebut akan dibagi setelah seluruh panen dilakukan.
2. Dampak dari adanya sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Palak Tanah yaitu mampu memenuhi kebutuhan tersebut yaitu : Terpenuhinya kebutuhan materi, kebutuhan fisik, kebutuhan mental, dan kebutuhan spiritual. Serta untuk kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah :
 - 1) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator Kependudukan menunjukan dalam tingkat kesejahteraan rendah.
 - 2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator kesehatan menunjukan dalam tingkat kesejahteraan sedang sedang.
 - 3) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator pendidikan menunjukan dalam tingkat kesejahteraan sedang.

- 4) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator ketenagakerjaan tingkat kesejahteraan sedang yaitu 20-50%.
- 5) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada indikator tingkat kesejahteraan taraf dan pola konsumsi rendah: >50%
- 6) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator perumahan dan lingkungan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang
- 7) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa Palak Tanah pada Indikator kemiskinan menunjukkan dalam tingkat kesejahteraan sedang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik lahan sawah, sampai saat ini kerjasama bagi hasil masih dilakukan secara lisan. Dalam hal ini penulis menyarankan supaya dalam melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil sebaiknya selain dilakukan dengan lisan juga harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan dengan saksi. Hal ini bertujuan jika terjadi penyimpangan, maka dapat diselesaikan dengan bukti yang kuat.
2. Bagi penggarap, dalam menggarap lahan sawah milik orang lain penggarap seharusnya dapat meneladani sifat Rasulullah saw. Yakni shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

3. Bagi pemerintah, hendaknya mendukung terhadap pengembangan ilmu dalam kerjasama penggarapan sawah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan baik didunia maupun diakhirat.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih baik lagi dalam mengkaji keilmuan, dan menambahkan variabel penelitian serta mengkaji lebih dalam dari segi berbagai sudut pandang.

DAFTAR PUSTAKA

Atika “*Pengaruh Pembiayaan Dan Tingkat Bahi Hasil Terhadap Tingkat Kesejahteraan Di Indonesia Dilihat Dari Pertumbuhan*”2017

ArifinSitio, *Koperasi :TeoridanPraktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001).

Badan Pusat Statistika, Jumlah Pekerja Sektor Pertanian, www.bps.go.id, diakses pada 13 Desember 2022

Bahreisy Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV* (Surabaya: Bina Imu, 1988)

Bawohan Andre Rolef, ddk, *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Tani Padi Sawah Di Kecamatan Langowan Utara*, Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Ekonomi, Vol. 17. No.2 (Mei 2021)

Bogdan, Biklen, *Pengantar Studi Penelitian* , (Bandung:: PT. Alfabeta, 1982)

Busthomi Achmad Otong, dkk, *Akad Muzara 'ah pertanian padi dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Al-Mustashfa*, vol. 3 No. 2, (Desember 2018)

Emily Nur Saidy “*Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kambo, Toli-Toli*” Jurnal Fakultas dan Bisnis Islam. Vol 6, No 1. 2019

<https://www.muaraenimkab.go.id/web/kontent/12/geografis> diakses pada tanggal 2 Januari 2023 13.00 WIB

Jannah Miftahul “*pengaruh sistem bagi hasil [erkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat*” jurnal fakultas ekonomi dan bisnis universitas Mulawarman

Khakim Luqman dkk “*Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat*” Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 12. No.2. 2011

Lestari Miming, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Di Kota Makasar*” (Makasar:UIN Alauddin, 2015)

- Levia Trisna “Pengaruh Nilai Bagi Hasil Penambangan Emas Terhadap Kesejahteraan Pekerja Tabang Emas di Desa Sumber Agung Kabupaten Merangin dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal Najaha Iqtishod*. Vol 3, No 2 . 2022
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta:Kencana, 2012) Al Kaaf Abdullah Zaky dan Maman Abdul Djaliel, *Ekonomi dalam perspektif Islam* (Pustaka Setia)
- Malik Mochammad Kail, dkk, “Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi; Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan: Ilmu Ekonomi: Dan Ilmu Sosial*, Vol.12, No.1 (2018)
- Muttalib Abdul “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur” *urnal JIME*. Vol.1 No. 2. 2015 hal 5. 2015
- Murni Indri Anjar “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Muzara’ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Penggarap (Studi Kasus Di Desa Tadokkong Kec. Lembang Kab. Pinrang” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar. 2019
- Narbuko Cholid dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Pasaribu Chairuman, K.Lubis, dan Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996)
- Pujileksono Sugeng, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Setara Press, 2016)
- Puspitasari Novi, dkk, “Muzara’Ah Pada Usaha Pertanian Padi : Analsis Nilai Nilai Islam Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”, *Bisma : Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 14, No. 1 (2020)
- Qardawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

- Ramilan Wardana, *Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Terhadap Petani Penggarap Padi Dengan Pemilik Lahan*, Skripsi Universitas Islam Makasar (2019)
- Rafly Muhammad, dkk, “ *Muzara'Ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2016)
- Rosni, *Jurnal Geografi “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Duhari Selabat Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”*. Vol 9 No. 1, 2017
- Sahrani Soharidan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sholahuddin Muhammad, *World Revolution With Muhammad* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 2009)
- Suciadi Muhammad “*Eksternalitas Positif Tambang BatuBara Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kutai Kartanegara*” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol 4, No 2. 2020
- Supomo dan Indriantoro, 2018, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Syaripudin Enceng Iip, *Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut)*, *Jurnal Shidqia Nusantara*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2020)
- Sugeng Rachmat, dkk, “*Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'Ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Sawah Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale Kab. Tana Toraja*”, *Indonesia Journal Of Business Analytics (IJBA)*, Vol. 1, No 2, (Oktober 2021)
- Sumodiningrat Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syamsuddien Darsyaf Ibnu, Darussalam, *Prototype Negeri Yang Damai* (Surabaya: Media Idaman Press, 1994)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif R&D), (Bandung: Alfabeta, 2014)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Telaumbauna Aferiaman “*Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*” jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi. Vol 1, No 1. 2022

Umar Husein, *Metodologi untuk penelitian skripsi dan testi bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Umrah, Miwan, *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bagi Hasil Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah*, J - Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial, Vol. 6 No. 2 (November 2021)

Wardani Diaz Rizqi, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara'ah* Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Di Tulungagung”, *Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan*, Vol.6 No.7, 2019

Wahyu A.Rio Makkulau, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Azhar Journal Of Islamic economics, Vol. 1 No. 1 (1 Januari 2019)

Wahyunigrum Ana Liana Dan Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah, Tawazum*: journal Of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 1. (2020).

Wulandar Arni “ *Analisis Sistem Bagi Hasil Produk Mudharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. 2015